



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025. Lebih lanjut isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 29 Juli 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kepala,



Hj. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Keputusan Kepala SKPD.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU.....	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra 7	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD	 42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran	47
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 49
4.1. Program dan Kegiatan	49
 BAB V PENUTUP.....	 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang di lakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka penjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan tata

pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 diamanatkan tujuh misi pembangunan Kutai Kartanegara, yaitu : pada misi ke

tujuh yaitu “MENINGKATNYA PERAN SERTA PEREMPUAN SEGALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK “

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender). Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas PP dan PA merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi ke tujuh RPJMD pembangunan tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia nomor 4438;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015-2019;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja

Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah :

1. untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- 1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
- 2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PP dan PA dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
- 3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
- 4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD Tahun lalu dan Capaian Renstra

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (RENJA) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2019 rencana Kerja Dinas PP dan PA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran renstra OPD pada tahun tersebut sebanyak 9 Program terdiri dari 4 program Generik dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 6 indikator Outcome dan 5 program wajib dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 7 indikator Outcome dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp.4.620.235.000,-

Adapun realisasi Tahun 2019 dari rencana pada renja dibanding realisasi yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan cakupan layanan administrasi perkantoran mencapai 100%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Persentase sarana dan prasarana kantor mencapai 100%;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator Rata-Rata Nilai Kinerja SKP tercapai 85,25

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi indikator Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA mencapai 100%, Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit realisasi mencapai 62,50 dan Indikator Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset realisasi mencapai 100%
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator Persentase OPD yang Melaksanakan ARG 86,21% dan Persentase PD yang memiliki data gender 86,21%.
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif 24,93%.
7. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO 76,03%, Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif 11,39%
8. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan indikator Kecamatan Layak Anak 38.89%.
9. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan ditargetkan 7.12%

Sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun 2019 anggaran dikelola oleh dinas PP dan PA sebesar 22,89% sehingga akan berpengaruh terhadap capaian indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program yang akan ditargetkan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator Persentase OPD yang Persentase OPD yang melaksanakan ARG 89.66%, Persentase PD yang memiliki Data Gender 89,66%.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif 26.24%.
3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO 100%, Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif 23.63%

4. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan indikator Kecamatan Layak Anak 55,56%.
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan ditargetkan 8.84%

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020
Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan 2020	
					Target Renja tahun 2019	Realisasi Renja 2019	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat capaian Realisasi target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	93.10	81.03	86.21	86.21	100.00	89.66	89.66	89.66
	Rapat Koordinasi PP dan PA	Jumlah Peserta	950	360	200	200	100.00	200	760	80.00
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi	83	53	22	22	100.00	8	83	100.00
	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah peserta workshop PPRG	600	-	0	-	-	200	200	33.33
		Persentase PD yang memiliki Data Gender	93.10	81.03	86.21	86.21	100.00	89.66	89.66	89.66

					Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Dokumen	1	-	1	1	100.00		1	100.00
					Penguatan Pokja PUG	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG	58	40	12	12	100.00	6	58	100.00
					Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi Pusat studi Gender dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelembagaan	40	10					10	25.00
					Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah Peserta Mengikuti pengembangan KIE Tentang KKG	1,800	-					0	0.00
					Penyusunan Data Terpilah Gender	Jumlah Dokumen	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
					Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Sistem Informasi Data Gender dan Anak	5	1					1	20.00
					Fasilitasi Pengembangan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang difasilitasi	50	5					5	10.00
					Pembinaan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang di Bina	36	9					9	25.00
					Penyusunan Regulasi Desa Gender	Jumlah Dokumen	1	-					0	0.00
					Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Jumlah kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	5						0	0.00

					Pembentukan Gender champions bagi PD	Jumlah orang yang mampu menjadi Gender champion di PD	58						0	0.00
					Fasilitasi Hasil Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Penilaian Program PP Prusahaan Pembina P2WKSS, RSSI&B, dan GSI/KSI	100						0	0.00
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di Lembaga legislatif dan eksekutif	29.99	25.25	25.55	24.93	97.57	26.24	26.24	26.24
					Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Jumlah Dokumen							0	#DIV/0!
					Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta	450	-	100	100	100.00	100	200	44.44
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta							0	#DIV/0!
					Peringatan Hari-Hari Besar Perempuan	Jumlah Peringatan							0	#DIV/0!
					Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan								0	#DIV/0!

						Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	100	95.65	100.00	98.35	98.35	100.00	100	100.00
					Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak yang difasilitasi	507	377	130	116	89.23		493	97.24
					Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak yang difasilitasi	330	-	-	-	-	110	110	33.33
					Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Yang ditangani	500	225	40	40	100.00	110	375	75.00
					Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Jumlah anak korban kekerasan yang di layani	500	377	40	40	100.00	100	517	103.40
					Sosialisasi masalah sosial anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	1,200	450	150	150	100.00	50	650	54.17
					Pemetaan Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tentang Perempuan dan Anak	5	-	1	1	100.00	1	2	40.00
					Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	250	-	0	-	-	50	50	20.00

					Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)							0	#DIV/0!
					Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)							0	#DIV/0!
					Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Pengaduan yang Terlayani							0	#DIV/0!
					Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Jumlah aparaturnya yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel							0	#DIV/0!
					Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah aparaturnya yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel							0	#DIV/0!
						Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	32.07	6.75	15.19	11.39	75		22	68.42
					Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	76	16	0	-	-	16	32	42.11

					Pelatihan dan Pengembangan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	122	-	60	60	100.00	60	49.18
					Program Pemenuhan hak - hak anak	Kecamatan Layak Anak	72.22	27.78	38.89	38.89	100.00	55.56	55.56
					Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	18	5	2	2	100.00	10	17
					Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Jumlah Dokumen RAD KLA	1	-	0	-	-	1	1
					Penyusunan Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen profil anak	1	1	0.00	-	-	0.00	1
					Pelatihan Konvensi Hak anak	Jumlah orang yg terlatih KHA	360					90	90
					Parenting bagi orang tua siswa	Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak						0	#DIV/0!
					Fasilitasi Forum anak (Pengarusutamaan Hak anak)	Jumlah forum anak yang terbentuk	450	70	6	6	100.00	50	126
					Fasilitasi Hari Besar Anak	Jumlah Peserta Anak yang mengikuti peringatan Hari besar anak	2,500	1,000	500	500	100.00	500	2000
					Worskshop gerakan mendongeng	Jumlah Guru dan anak yang bisa mendongeng						0	#DIV/0!

					Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Tenaga terapis yang terlatih							0	#DIV/0!
					Fasilitasi Forum Peduli ABK	Jumlah Forum Peduli ABK yang terbentuk dikecamatan	19	7	4	4	100.00	4	15	78.95
					Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga)	Jumlah Keluarga yang terlayani	350	-	0	-	-	150	150	42.86
					Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Kelompok Usaha Perempuan yang dibina	11.19	5.08	6.96	7.12	102.30	8.84	8.84	8.84
					Bimbingan Manajemen Usaha Perempuan	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang dibina	797	300	157	157	100.00	201	658	82.56
					Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan dalam Pembangunan	50	-					0	0.00
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	72	36	12	12	100.00	12	60	83.33
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	152	54	28	28	100.00	25	107	70.39

					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur	66	33	11	11	100.00		44	66.67
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	3,100	72	52	52	100.00		124	4.00
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	266	83	52	52	100.00	52	187	70.30
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	6,468	1768	1000	1000	100.00	1,518	4286	66.26
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	46,296	4752	7716	7716	100.00	2,205	14673	31.69
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum	212	10	29	29	100.00	15	54	25.47
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	72	24	12	12	100.00	12	48	66.67
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur	372	117	62	62	100.00	62	241	64.78
					Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	114	38	19	19	100.00	19	76	66.67

					Facilitasi Memperingati Hari-hari Besar tertentu (Pameran)	Jumlah Pameran	18	5	2	2	100.00	2	9	50.00
					Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola	3	0	1	1	100.00	1	2	66.67
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	100	100	100.00	100	100.00	100.00	100	100.00
					Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	136	52	28	28	100.00	28	108	79.41
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan	93	45	15	15	100.00	15	75	80.65
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	85	85	85	85	85	85	85	100
					Facilitasi TIM BEKIAS		60	-	20	20	100.00	20	40	66.67
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
						Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100	100	100	100	100	100	100	100

					Penyusunan Dokumen Rencana Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah Dokumen	36	6	6	6	100.00	6	18	50.00
						Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	71,42	62.5	62.5	62.5	100.00	71.41	71.41	71.41
					Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja	12	0	0	0	-	6	6	50.00
						Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
					Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD	24	0	-	-	-	12	12	50.00
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Ruangan	36	6	12	12	100.00	12	30	83.33

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dasar pembentukan Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPPO) untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komperhensif dan multi sektor, diharapkan pemerintah daerah (Kutai Kartanegara) memiliki kerangka hukum mengenai (PTPPPO) dan partisipasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/trafficking, sebanyak 2 kasus tahun 2016.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusat-pusat

krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2018 berjumlah 138 kasus.

Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A.

Pada Misi Ke tujuh RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Meningkatnya peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak, adapun sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator sebagai berikut sesuai dengan adanya revisi Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Persentase ARG dalam APBD
- Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dan 22 indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 terhadap target SPM adalah 66,67% atau sebanyak 7 indikator kinerja yang berhasil mencapai target dari 22 indikator kinerja SPM.

Rincian pencapaian indikator kinerja terhadap target per jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Standar Pelayanan Minimal ini berisikan 5 (lima) layanan dasar dan 8 (delapan) indikator utama, selanjutnya akan diuraikan satu persatu bagaimana masing-masing indikator tersebut dilaksanakan. Agar pelaksanaan dan mutu layanan menjadi standar, perlu dikembangkan sebuah petunjuk teknis yang akan memberikan pedoman pelaksanaan di setiap layanan dan disertai dengan indikator serta cara perhitungan masing-masing indikator.

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang:

- a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Cakupan RSUD/RSUD/RS swasta, yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas;
 - d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS.
3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama:
- a) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang dimaksud dalam SPM ini adalah : pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang :

- Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih;
 - Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama :
- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum adalah

jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang:

- Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian;
 - Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta;
 - Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA;
 - Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender;
 - Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama:
- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang:
 - Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

Dari hasil pembahasan di berdasarkan visi dan misi pemerintah kabupaten kutai kartanegara dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencapai untuk maksimalkan pekayanan OPD DPPPA tahun 2016-2021 memiliki indikator sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPPA

dapat dilihat dari Tabel 2.2 tentang pencapaian kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2.2 tentang
pencapaian kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5					6			7	
1	Persentase ARG dalam APBD			18.56	12.43	15.11	16.99	17.4	18.56	12.43	15.84	16.99	17.4
2	Kabupaten Layak Anak (KLA)			510	510	610	710	810	510	510	610	710	810
3	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			175	160	130	110	90	131	138	121	110	90
4	Predikat akuntabilitas DP3A			76	76	76	77	78	76	76	73.56	77	78

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di atas dan peran Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam di kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih
2. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak
3. Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal
4. Rendahnya Angka IPG dan IDG
5. Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal
6. Implementasi Kebijakan masih belum Optimal
7. Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi

Dari permasalahan diatas Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara guna mewujudkan pencapaian tujuan masyarakat Kutai Kartanegara secara bersama yang intinya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Oleh karena itu maka peran perempuan Kutai Kartanegara dalam bidang ekonomi pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan.

Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Dinas koordinatif dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki beberapa program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan dan anak dalam kegiatan Fasilitasi Kabupaten Layak Anak, RAD KLA Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut sesuai amanah peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator kabupaten Kota Layak anak. Juga memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang penunjukan dan Penetapan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai 10 Kabupaten / Kota pengembang kota / Kabupaten kota layak anak. Berkenaan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam rancangan

program pembangunan menuju kabupaten layak anak (KLA). KLA adalah Pembangunan menuju kabupaten/kota layak anak, yaitu sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD:

- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum (Bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;
- Ketersediaan Rumah Tangga dengan akses air bersih;
- Ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok;
- Tersedianya sekolah yang ramah Anak;
- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- Tersedianya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
- Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
- Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan salah satunya adalah melalui :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan indikator yang ingin dicapai Persentase OPD yang melaksanakan ARG dan Persentase PD yang memiliki Data yang terdiri dari salah satu kegiatannya Rapat Koordinasi PP dan PA, Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaa Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Penyusunan Data Terpilah Gender
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan Indikator yang ingin di capai Persentase perempuan di lembaga legislatif dan

eksekutif dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator kinerja yang akan dicapai Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dengan kegiatan yang ingin usulkan Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak dan Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
4. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan indikator yang ingin dicapai Kecamatan Layak Anak dengan kegiatan yang akan diusulkan diantaranya Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA), Fasilitasi Forum anak dan Fasilitasi Forum Peduli ABK
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan adapun kegiatan yang diusulkan Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan renstra terdapat dua (2) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat dibawah ini :

SEBELUM		SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan anak	IPG	Meningkatnya Partisipasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta Penguatan Perlindungan Perempuan dan anak	Persentase ARG dalam APBD
	IDG		Kabupaten Layak Anak (KLA)
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)		Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
	Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (kasus kekerasan)		

**Tabel 2.4 tentang
Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**

No	Rancangan awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1,211,389,994		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	976,604,000	Sekretaris DP3A
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPP & PA	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	bln	12	15,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPP & PA	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	bln	12	25,440,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	DPP & PA	Jumlah kendaraan Dinas	unit	27	45,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	DPP & PA	Jumlah kendaraan Dinas	unit	27	20,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPP & PA	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	45	10,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPP & PA	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	15	5,000,000	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPP & PA	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	unit	55	50,000,000		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPP & PA	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	unit	25	40,000,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPP & PA	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	40	150,000,000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPP & PA	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	25	65,000,000	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPP & PA	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Cetakan	4725	37,000,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPP & PA	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Cetakan	1500	8,500,000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPP & PA	Jumlah bahan bacaan	Exemplar	4752	25,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPP & PA	Jumlah bahan bacaan	Exemplar	1750	9,000,000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPP & PA	jumlah makanan dan minuman	bln	12	65,000,000		Penyediaan Makanan dan Minuman	DPP & PA	jumlah makanan dan minuman	bln	12	40,000,000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	DPP & PA	Jumlah Aparatur	org	122	260,000,000		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	DPP & PA	Jumlah Aparatur	org	58	260,000,000	

10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	DPP & PA	Jumlah Tenaga Honorer	org	19	379,389,994		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	DPP & PA	Jumlah Tenaga Honorer	org	19	379,390,000	
11	Penataan arsip perangkat daerah	DPP & PA	Jumlah paket penataan arsip	pkt	1	50,000,000		Penataan arsip perangkat daerah	DPP & PA	Jumlah paket penataan arsip	pkt	1	25,000,000	
12	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Tenggara, Sanga-sanga	Jumlah Pameran	pameran	3	125,000,000		Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Tenggara, Sanga-sanga	Jumlah Pameran	pameran	2	99,274,000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	%	100	275,000,000		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	%	100	175,000,000	Sekretaris DP3A
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	DPP & PA	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional DPP & PA	unit		75,000,000		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	DPP & PA	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional DPP & PA	unit	28	75,000,000	
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPP & PA	Jumlah Perlengkapan	unit		150,000,000		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPP & PA	Jumlah Perlengkapan	unit	15	100,000,000	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPP & PA	Jumlah Gedung Pemeliharaan	unit		50,000,000		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPP & PA	Jumlah Gedung Pemeliharaan	unit			
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	Stell		122,000,000		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	Stell		0	Sekretaris DP3A
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPP & PA	Jumlah Pengadaan	Stell	61	122,000,000		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPP & PA	Jumlah Pengadaan	Stell	61		
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		85	220,000,000		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		85	100,000,000	Sekretaris DP3A
17	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	DPP & PA	Jumlah orang yang difasilitasi	org	20	100,000,000		Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	DPP & PA	Jumlah orang yang difasilitasi	org	20	100,000,000	
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	org	35	60,000,000		Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	org	35		
19	Workshop / BIMTEK	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	org	20	60,000,000		Workshop / BIMTEK	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	org	20		

V	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					366,804,000		Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					316,804,000	Sekretaris DP3A
			Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	%	100	150,000,000				Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	%	100	150,000,000	
20	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	DPP & PA	Jumlah Dokumen	dokumen	6	150,000,000		Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	DPP & PA	Jumlah Dokumen	dokumen	6	150,000,000	
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	%	71.42	118,959,200				Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	%	71.42	118,959,200	
21	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	DPP & PA	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Keuangan	dokumen	3	118,959,200		Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	DPP & PA	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Keuangan	dokumen	3	118,959,200	
			Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	%	100	97,844,800				Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	%	100	47,844,800	
22	Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	DPP & PA	Jumlah Ruang yang diinventarisasi	dokumen	12	50,000,000		Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	DPP & PA	Jumlah Ruang yang diinventarisasi	dokumen	12		
23	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPP & PA	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		12	47,844,800		Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPP & PA	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		12	47,844,800	
VI	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					3,525,000,000		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					1,000,000,000	Bidang KHPKDI
			Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	%	93.1	1,550,000,000				Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	%	93.1	825,000,000	
24	Rapat Koordinasi PP dan PA	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD	58	250,000,000		Rapat Koordinasi PP dan PA	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD	58	250,000,000	
25	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Organisasi	Organisasi	9	200,000,000		Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Organisasi	Organisasi	9	200,000,000	

26	Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	200,000,000		Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
27	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah peserta workshop PPRG	org	200	300,000,000		Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah peserta workshop PPRG	org	100	225,000,000	
28	Pemilihan dan Seleksi Gender Champion	Kab. Kukar	Jumlah Orang	org	20	100,000,000		Pemilihan dan Seleksi Gender Champion	Kab. Kukar	Jumlah Orang	org	20		
29	Penguatan Pokja PUG	Kab. Kukar	Jumlah POKJA PUG	OPD	58	250,000,000		Penguatan Pokja PUG	Kab. Kukar	Jumlah POKJA PUG	OPD	52	150,000,000	
30	Pembinaan Desa Gender	Kab. Kukar	Jumlah Desa Gender yang di bina	desa	12	250,000,000		Pembinaan Desa Gender	Kab. Kukar	Jumlah Desa Gender yang di bina	desa	12		
			Persentase PD yang memiliki data gender	%	93.1	1,975,000,000				Persentase PD yang memiliki data gender	%	93.1	175,000,000	
31	Identifikasi capaian indikator kualitas keluarga	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	150,000,000		Identifikasi capaian indikator kualitas keluarga	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
32	Kajian Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	200,000,000		Kajian Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
33	Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	200,000,000		Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
34	Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	200,000,000		Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
35	Penyusunan Data Terpilah Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	175,000,000		Penyusunan Data Terpilah Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	175,000,000	
36	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	dokumen	1	250,000,000		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	dokumen	1		
37	Workshop Forum Data	Kab. Kukar	Jumlah OPD	dokumen	1	200,000,000		Workshop Forum Data	Kab. Kukar	Jumlah OPD	dokumen	1		

38	Analisis Data Capaian IDG dan IPG	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	300,000,000		Analisis Data Capaian IDG dan IPG	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
39	Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	200,000,000		Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
40	Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	100,000,000		Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	%	29.99	550,000,000		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	%	29.99	250,000,000	Bidang KHPKDI
41	Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1	150,000,000		Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	dokumen	1		
42	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	org	200	250,000,000		Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	org	200	250,000,000	
43	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	org	250	150,000,000		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	org	250		
VIII	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	%	11.19	550,000,000		Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	%	11.19	550,000,000	Bidang KHPKDI
44	Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Tgr, Ma Badak, Marang kayu, Loa Kulu, Loa Janan, Sanga-		perempuan		350,000,000		Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Kab. Kukar		perempuan	300	550,000,000	

		sanga, Anggan a												
45	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Kab. Kukar		pameran		200,000,000		Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Kab. Kukar		pameran			
IX	Program Pemenuhan Hak-hak Anak		Tingkatan Kota Layak Anak	%	72.2	2,400,000,000		Program Pemenuhan Hak-hak Anak		Tingkatan Kota Layak Anak	%	72.2	1,085,000,000	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
46	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	kecamatan	1	250,000,000		Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	kecamatan	1	200,000,000	
47	Pelatihan Konvensi Hak anak	Kab. Kukar	Jumlah orang yg terlatih KHA	orang	90	250,000,000		Pelatihan Konvensi Hak anak	Kab. Kukar	Jumlah orang yg terlatih KHA	orang	90	150,000,000	
48	Parenting bagi orang tua siswa	Kab. Kukar	Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak	orang	200	500,000,000		Parenting bagi orang tua siswa	Kab. Kukar	Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak	orang	200	185,000,000	
49	Fasilitasi Forum anak	Kecamatan dan Desa	Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	forum	25	200,000,000		Fasilitasi Forum anak	Kecamatan dan Desa	Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	forum	20	150,000,000	
50	Fasilitasi Hari Besar Anak	Kab. Kukar	Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	anak	500	200,000,000		Fasilitasi Hari Besar Anak	Kab. Kukar	Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	anak	250	100,000,000	
51	Workshop gerakan mendongeng	Kab. Kukar	Jumlah Guru dan anak yang bisa mendongeng	anak	200	250,000,000		Workshop gerakan mendongeng	Kab. Kukar	Jumlah Guru dan anak yang bisa mendongeng	anak	200		
52	Fasilitasi Forum Peduli ABK	Kab. Kukar	Jumlah Forum yang terbentuk	forum	3	250,000,000		Fasilitasi Forum Peduli ABK	Kab. Kukar	Jumlah Forum yang terbentuk	forum	3	150,000,000	
53	Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Kab. Kukar	Tenaga terapis yang terlatih	Orang	5	300,000,000		Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Kab. Kukar	Tenaga terapis yang terlatih	Orang	5		
54	Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga)	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang terlayani	Keluarga	200	200,000,000		Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga)	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang terlayani	Keluarga	150	150,000,000	

X	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					2,750,000,000		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					1,010,000,000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
			Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	100	2,450,000,000				Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	100	750,000,000	
55	Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	Kasus	90	500,000,000		Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	Kasus	90	300,000,000	
56	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	perempuan	100	150,000,000		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	perempuan	100		
57	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	Peserta	50	250,000,000		Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	Peserta	50	250,000,000	
58	Sosialisasi Perundang- Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang- Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Peserta	100	150,000,000		Sosialisasi Perundang- Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang- Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Peserta	100		
59	Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Kab. Kukar	Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak	anak	100	150,000,000		Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Kab. Kukar	Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak	anak	100		

60	Sosialisasi masalah sosial anak	Kab. Kukar	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	anak	50	100,000,000		Sosialisasi masalah sosial anak	Kab. Kukar	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Peserta	100	100,000,000	
61	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	orang	100	150,000,000		Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	orang	100		
62	Pemetaan Jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	dokumen	100	150,000,000		Pemetaan Jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	dokumen	1	100,000,000	
63	Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Kab. Kukar	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Pengaduan	190	400,000,000		Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Kab. Kukar	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Pengaduan	190		
64	Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	orang	30	200,000,000		Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	orang	30		
65	Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	orang	50	250,000,000		Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	orang	50		
			Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	32.07	300,000,000				Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	32.07	260,000,000	

66	Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	Kelompok	20	200,000,000		Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	Kelompok	20	160,000,000	
67	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	orang	30	100,000,000		Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	orang	30	100,000,000	
	J U M L A H					11,970,193,994		J U M L A H					5.463.408.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan (Musrenbang) desa ataupun musrenbang kecamatan tidak terdapat usulan dari masyarakat yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kutai kartanegara.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Melalui Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG), berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah kebijakan nasional, maka strategi PPRG meliputi strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum mengacu pada dua permasalahan yang dihadapi adalah penerapan PPRG di tingkat nasional dan daerah yaitu :

- a. Penguatan dasar hukum
- b. Penguatan koordinasi baik antar sesama instansi penggerak maupun antar penggerak dengan instansi pelaksana.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum yaitu penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain dapat dilihat :

- 1) Belum optimalnya dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan
- 2) Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
- 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Masalah lainnya adalah belum tersedianya data terpilah sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesenjangan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh :

- (1) Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran kabupaten/kota,
- (2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi,
- (3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.
- (4) Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD, belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga

sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pentingnya data terpilah, mengidentifikasi masalah dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial, ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisa jender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif atau kualitatif, dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender :

- ❖ Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
- ❖ Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
- ❖ Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DINAS PP & PA ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun RENSTRADINAS PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain :

- a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
- b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ;
- c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan;
- e. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
- f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
- g. Belum adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. Budaya *patriarckhi* di masyarakat;
- i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;

- j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS pemerhati perempuan dan anak;
- k. Kebijakan daerah belum *responsive gender*;
- l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan
- m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

- a) Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
- b) Telah adanya regulasi yang *responsive gender*;
- c) Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
- d) Telah adanya komitmen kepala daerah mengenai PUG;
- e) Telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak;
- f) Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA;

Di Bidang Partisipasi Anak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, dan 2 (dua) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Anak, sampai dengan Tahun 2016 terbentuk FORUM Anak di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa se Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik ditingkat nasional maupun di daerah. Di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Tahun 2013 melibatkan Forum Anak dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu Kementrian PPPA juga mengikutsertakan Forum Anak Daerah dalam konferensi tingkat Asia yang dilaksanakan di Kota Solo, yang membahas tentang partisipasi anak dan Kabupaten / Kota Layak Anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) di Tingkat Provinsi KALTIM.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antara lintas OPD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas, sehingga banyak tidak dapat bersekolah di sekolah umum Inklusi. Data ABK dari SLB tahun 2014 berjumlah 111 orang dan di tahun 2015 berjumlah 125 Orang. Ini menunjukkan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat.

Permasalahansosial anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak korban penyalahgunaan narkoba yang dibina dikalapas Kelas II B Tenggarong

pada tahun 2014 berjumlah 22 orang dan tahun 2015 sebanyak 15 orang. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainnya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan, di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa-desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (broken home).

Capaian pembangunan anak, kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal yaitu : pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip – prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

- a. Non – Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan suku, status ekonomi, kondisi fisik anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mengupayakan semua keputusan kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak.
- c. Mengutamakan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya.
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Pemenuhan hak identitas anak dapat dilihat dari meningkatnya cakupan akte kelahiran anak usia 0 – 18 tahun se Kabupaten Kutai Kartanegara dari 266,443 orang yang didata sampai dengan bulan September 2019 = 163,875, terdata 61.50 % (data dari DISDUKCAPIL) yang sudah terlayani dan mendapatkan akte kelahiran.

Upaya percepatan pemilikan akte kelahiran dilakukan melalui penetapan UU No mor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 desember 2013. MoU delapan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan akte Kelahiran.

Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABDH) dengan diterapkannya undang-undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak maka anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan rehabilitasi (anak ini diberikan hak-haknya terutama untuk memperoleh pendidikan walaupun berhadapan dengan hukum).

Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui

Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama empat Kabupaten/Kota menjadi Kabupaten Menuju Kota Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) dengan Pendukung PERDA NO 9 Tahun 2004 Tentang ZONA BEBAS PEKERJA ANAK. Pada Tahun 2013 Presiden RI melalui Kementerian PP PA menunjuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu dari 5 Kabupaten / Kota di Indonesia untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan & Penetapan Kabupaten/Kota Yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 5 daerah Kabupaten / Kota lainnya menganugerahkan KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK di Tingkat PRATAMA dari 37 kabupaten/kota se Indonesia. Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, di pandang perlu adanya :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 334/ SK – Bup/ HK/ 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Pengembangan Layak Anak (KLA).
2. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 1 Tahun 2012 tentang pengembangan Program dan Anggaran terhadap percepatan Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten layak Anak (KLA) bagi setiap OPD sesuai dengan Indikator dan Tupoksi OPD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN DAN KELURAHAN / DESA Penbentukan Kabupaten Kutai Kartanegara Menerbitkan SK Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun.
4. Bahkan Anak berhadapan dengan hukum harus melanjutkan sekolah dari tingkat SD / SLTP / MTS / Pasanteren / SLTA / dan Perguruan Tinggi di fasilitasi oleh TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK DI TK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 KEMEN PPPA menggagas tersusunya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersamasembilan K / L terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, BNPN, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga Internasional, lembaga pemerhati anak dan pakar anak.

Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak & perlindungan anak. Alasan mengapa Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilaksanakan karena:

- Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial;
- Jumlah anak 30 - 36% dari total penduduk , tidak bisa diabaikan;
- Perubahan global mengancam tata nilai agama, sosial, dan budaya lokal;
- Embrio SDM yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; dan

- Anak terancam menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlakuan salah.

Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat pratama dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh SKPD terkait untuk dapat mengintegrasikan kedalam program SKPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

Di Bidang Pemenuhan hak Kesehatan Anak, Kementerian PPPA RI bersama tiga Kementerian terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi kesakitan pada anak sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 1 PUSKEMAS yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Rapak Mahang. Upaya pemenuhan hak kesehatan anak lainnya seperti penurunan angka kematian bayi (ABK) di bulan Januari s/d Agustus Tahun 2016 berjumlah 90 Orang dan Angka Kematian Bayi dan Anak (AKBK), hasil survey PSG balita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 status Kekurangan GIZI 22,67% se Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan ketersediaan air bersih Tahun 2015 daerah perkotaan sebanyak 80% dan daerah pedesaan 60 % dari jumlah penduduk Kutai Kartanegara.

Di bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, telah dilakukan beberapa upaya seperti mendorong tersedianya Rute Aman Sekolah ke / dari Sekolah (RASS) terkait (DPPA, Perhubungan, Ciptakarya, Dikbud, Kementerian Agama dan POLRES KUKAR) selain itu juga dilakukan sosialisasi, KIE, dan pelatihan kepada FORUM ANAK di Tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan dalam upaya penanaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam upaya mendukung penciptaan infrastruktur yang ramah anak juga telah diinisiasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Ruang BERMAIN RAMAH ANAK. Dalam rangka Meningkatkan peran PERLINDUNGAN ANAK, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak telah mengeluarkan PERDA NO 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dapat dijadikan acuan bagi PEMDA dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kualitas hidup anak di segala bidang dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelantaran dan perlakuan salah lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PP dan PA dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum memiliki pendamping korban tingkat kecamatan/desa	Membentuk kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih	Kurangnya pemahaman masyarakat dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Memberikan pemahaman ke masyarakat tentang kekerasan dan dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
			Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak	Para pengambil kebijakan belum banyak membuat kebijakan yang responsif anak	Mendorong stakeholder untuk responsif terhadap pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
						Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
						Program Pemenuhan Hak-Hak Anak
			Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal	Masih Banyak ASN yang Belum Memahami Tentang PUG	Fasilitasi dan advokasi kepada OPD beserta seluruh ASN didalamnya untuk implementasi PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Rendahnya Angka IPG dan IDG	Belum Optimalnya OPD yang terkait Dengan IPG dan IDG	Sinkronisasi dan Penguatan Indikator Variabel IPG dan IDG oleh Masing Masing OPD Terkait	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal	Rendahnya Partisipasi terhadap Pembangunan Kesetaraan Gender	Mempercepat Implementasi PUG dan Memperkuat Peran Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			Implementasi Kebijakan masih belum Optimal	Konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan masih kurang	Memperkuat dan Mempertajam pelaksanaan kebijakan terhadap peran, kedudukan dan fungsi pemberdayaan pp dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi	Akses pp dalam mendapatkan informasi usaha masih sulit. 2. Kurangnya permodalan usaha. 3. Rendahnya kualitas SDM	Memberikan akses Informasi dan kesempatan seluas luasnya bagi perempuan untuk memperoleh bantuan modal serta memberikan bimbingan manajemen usaha	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2021 adalah sebanyak 69 Kegiatan dan 10 Program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada perubahan terhadap indikator program :

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	Jumlah OPD yang melaksanakan ARG dibagi jumlah OPD Keseluruhan dikalikan 100%
		Persentase PD yang memiliki data gender	Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD dikali 100
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	(Jumlah Anggota DPRD Perempuan ditambah Perempuan yang Menduduki Jabatan)dibagi(jumlah anggota DPRD ditambah Jabatan yang tersedia)dikali 100
3.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Jumlah Kekerasan pada perempuan dan anak termasuk TPPO yang dilayani dibagi Jumlah Kekerasan pada perempuan dan anak termasuk TPPO x 100
		Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	Jumlah PATBM yang terbentuk dibagi jumlah desa x 100

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
4.	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah pelaku usaha perempuan yg dibina dibagi Jumlah Pelaku Usaha Perempuan x 100
5.	Program Pemenuhan Hak-hak Anak	Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang menginisiasi KLA dibagi dengan jumlah kecamatan x 100

c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan Reancangan awal

Dalam melakukan perumusan Program dan kegiatan sejauh ini masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Akan tetapi dari penetapan pagu Indikatif terdapat ada beberapa perubahan dalam penyusunan renja Tahun 2021

d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta Prakiraan Maju Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Penanggung Jawab
			Lokasi	Satuan	T	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Sumber Dana		T	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	976,604,000			100	1,223,389,994	Sekretaris DP3A
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	DPP & PA	bulan	12	25,440,000	APBD	Tambahan Pembayaran Listrik, Air Bersih dan Internet Untuk UPT UPPA	12	27,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	DPP & PA	Unit	27	20,000,000	APBD		27	65,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	DPP & PA	jenis	15	5,000,000	APBD		45	10,000,000	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	DPP & PA	jenis	25	40,000,000	APBD		55	50,000,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	DPP & PA	jenis	25	65,000,000	APBD		40	75,000,000	

6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	DPP & PA	Cetakan	1500	8,500,000	APBD		4725	37,000,000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	DPP & PA	Exp	1750	9,000,000	APBD		4752	25,000,000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	DPP & PA	bulan	12	40,000,000	APBD		12	65,000,000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur	DPP & PA	orang	58	260,000,000	APBD		122	315,000,000	
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	DPP & PA	orang	19	379,390,000	APBD		19	379,389,994	
11	Penataan arsip perangkat daerah	Jumlah paket penataan arsip	DPP & PA	Paket	1	25,000,000	APBD		1	50,000,000	
12	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	Jumlah Pameran	Tenggarong, Sanga-sanga	pameran	2	99,274,000	APBD		3	125,000,000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik		%	100	175,000,000			100	275,000,000	Sekretaris DP3A
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional DPP & PA	DPP & PA	Unit	28	75,000,000	APBD		28	75,000,000	
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan	DPP & PA	Unit	10	100,000,000	APBD		30	150,000,000	

15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Pemeliharaan	DPP & PA	Gedung	5		APBD		2	50,000,000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur		Surat	0	-			0	122,000,000	Sekretaris DP3A
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan	DPP & PA	Stel	61		APBD		61	122,000,000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		Rata-rata	85	100,000,000			85	220,000,000	Sekretaris DP3A
17	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah orang yang difasilitasi	DPP & PA	Orang	20	100,000,000	APBD		20	100,000,000	
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang dilatih	DPP & PA	Orang	35		APBD		35	60,000,000	
19	Workshop / BIMTEK	Jumlah Aparatur yang dilatih	DPP & PA	Orang	20		APBD		20	60,000,000	
V	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					316,804,000				485,000,000	Sekretaris DP3A
		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA			100%	150,000,000			100%	200,000,000	

20	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen	DPP & PA	Dukumen	6	150,000,000	APBD		6	200,000,000	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit				118,959,200				150,000,000	
21	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan	DPP & PA	Laporan	3	118,959,200			3	150,000,000	
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset				47,844,800				135,000,000	
22	Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Jumlah Ruang yang diinventarisasi	DPP & PA	Ruag	12		APBD		12	50,000,000	
23	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	DPP & PA	Laporan	12	47,844,800			12	85,000,000	
VI	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					1,000,000,000				3,525,000,000	Bidang KHPKKDI
		Persentase OPD yang Melaksanakan ARG		%	89.66	825,000,000	APBD		93.10	1,550,000,000	
24	Rapat Koordinasi PP dan PA	Jumlah OPD	Kab. Kukar	OPD	58	250,000,000	APBD		58	250,000,000	
25	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi	Kab. Kukar	Organisasi	9	200,000,000	APBD		9	200,000,000	

26	Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD	1	200,000,000	
27	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah peserta workshop PPRG	Kab. Kukar	Peserta	100	225,000,000	APBD	200	300,000,000	
28	Pemilihan dan Seleksi Gender Champion	Jumlah Orang	Kab. Kukar	Orang	20		APBD	20	100,000,000	
29	Penguatan Pokja PUG	Jumlah POKJA PUG	Kab. Kukar	OPD	52	150,000,000	APBD	58	250,000,000	
30	Pembinaan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang di bina	Kab. Kukar	Desa	12		APBD	12	250,000,000	
		Persentase PD yang memiliki data gender		%	86.21	175,000,000	APBD	93.10	1,975,000,000	
31	Identifikasi capaian indikator kualitas keluarga	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD	1	150,000,000	
32	Kajian Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD	1	200,000,000	
33	Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD	1	200,000,000	
34	Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD	1	200,000,000	
35	Penyusunan Data Terpilah Gender	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1	175,000,000	APBD	1	175,000,000	

36	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Aplikasi	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD		1	250,000,000	
37	Workshop Forum Data	Jumlah OPD	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD		1	200,000,000	
38	Analisis Data Capaian IDG dan IPG	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Aplikasi	1		APBD		1	300,000,000	
39	Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	OPD	1		APBD		1	200,000,000	
40	Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD		1	100,000,000	
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif		Persentase	26.24	250,000,000		Indikator program di gabung	29.99	550,000,000	Bidang KHPKKDI
41	Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	Dokumen	1		APBD		1	150,000,000	
42	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta	Kab. Kukar	Peserta	200	250,000,000	APBD		200	250,000,000	
43	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta	Kab. Kukar	Peserta	250		APBD		250	150,000,000	
VIII	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan			11.19	550,000,000			11.19	550,000,000	Bidang KHPKKDI

44	Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	Kab. Kukar	Pelaku Usaha	300	550,000,000	APBD	Fokir Rp. 200.000.000	200	350,000,000	
45	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah Pameran	Kab. Kukar	Pameran	5		APBD		5	200,000,000	
IX	Program Pemenuhan Hak-hak Anak	Tingkatan Kota Layak Anak		%	55.6	1,085,000,000			72.2	2,400,000,000	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
46	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	Kab. Kukar	Kecamatan	1	200,000,000	APBD		1	250,000,000	
47	Pelatihan Konvensi Hak anak	Jumlah orang yg terlatih KHA	Kab. Kukar	Peserta	90	150,000,000	APBD		90	250,000,000	
48	Parenting bagi orang tua siswa	Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak	Kab. Kukar	Peserta	200	185,000,000	APBD		200	500,000,000	
49	Fasilitasi Forum anak	Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	Kecamatan dan Desa	Anak	20	150,000,000	APBD		25	200,000,000	
50	Fasilitasi Hari Besar Anak	Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	Kab. Kukar	Anak	250	100,000,000	APBD		500	200,000,000	
51	Worskshop gerakan mendongeng	Jumlah Guru dan anak yang bisa mendongeng	Kab. Kukar	Anak	200		APBD		200	250,000,000	
52	Fasilitasi Forum Peduli ABK	Jumlah Forum yang terbentuk	Kab. Kukar	Forum	3	150,000,000	APBD		3	250,000,000	
53	Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Tenaga terapis yang terlatih	Kab. Kukar	Orang	5		APBD		5	300,000,000	

54	Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga)	Jumlah Keluarga yang terlayani	Kab. Kukar	Keluarga	150	150,000,000	APBD		200	200,000,000	
X	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					1,010,000,000				2,750,000,000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
		Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO		%	100	750,000,000	APBD		100	2,450,000,000	
55	Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	Kab. Kukar	Korban	90	300,000,000	APBD		90	500,000,000	
56	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	Kab. Kukar	Korban Kekerasan	100		APBD		100	150,000,000	
57	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	Kab. Kukar	Aparatur	50	250,000,000	APBD		50	250,000,000	
58	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Orang	100		APBD		100	150,000,000	

59	Facilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Terlaksananya Fasilitas penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Kab. Kukar	Korban Kekerasan	100		APBD		100	150,000,000	
60	Sosialisasi masalah sosial anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kab. Kukar	Peserta	100	100,000,000	APBD		50	100,000,000	
61	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Orang	100		APBD		100	150,000,000	
62	Pemetaan Jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	100,000,000	APBD		100	150,000,000	
63	Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Kab. Kukar	Korban Kekerasan	190		APBD		190	400,000,000	
64	Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Jumlah aparaturnya yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Kab. Kukar	Aparatur	30		APBD		30	200,000,000	
65	Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah aparaturnya yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Kab. Kukar	Aparatur	50		APBD		50	250,000,000	

		Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif		%	23.63	260,000,000	APBD		32.07	300,000,000	
66	Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	Kab. Kukar	Kelompok	20	160,000,000	APBD		20	200,000,000	
67	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Kukar	Orang	30	100,000,000	APBD		30	100,000,000	
	J U M L A H					5,463,408,000				12,100,389,994	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah.

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat.
2. Keadaan kantor yang masih belum representatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak.
3. Ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi.
4. Banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau.

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Dalam menentukan arah jalannya organisasi salah satunya adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Rencana Tindak Lanjut.

- ✓ Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.
- ✓ Mendorong upaya pembinaan pelaku usaha perempuan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- ✓ Mendorong OPD Baik OPD di Kabupaten maupun OPD kecamatan untuk menginisiasi Kecamatan Layak Anak

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 29 Juli 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara



Hj. Aji Lina Rodiah, SE

NIP. 19650325 198503 2 010